



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.676-Bag.Huk-HAM/2015
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Analis Produk Hukum Daerah pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.065-Bag.Huk-HAM/2015, namun dalam perkembangannya sejalan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Analis Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Analis Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Analis Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Analis Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi dan menganalisis usulan Rancangan Peraturan Daerah sertamelakukan proses penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPERDA) berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa;
2. membuat konsep usulan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPERDA) untuk ditandatangani oleh Walikota Bandung dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah dan meneliti usul Naskah Akademik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
4. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah dan meneliti usul Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
5. menyempurnakan dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah dari usulan konsep awal yang telah disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;

6. menyajikan ...

6. menyajikan Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan di Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah;
7. mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. menyusun konsep tanggapan Walikota Bandung atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
9. menyusun konsep jawaban Walikota Bandung atas tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
10. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
12. mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
13. memberikan tanggapan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. memberikan tanggapan dalam pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah, di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
15. melakukan telaahan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
16. melakukan telaahan dan kajian dalam rangkaimplementasi Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi;
17. menyampaikan ...

17. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung u.p. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Analisis Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.065-Bag.Huk-HAM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Analisis Produk Hukum Daerah pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.676.Bag.Huk-HAM/2015
TANGGAL : 10 Juli 2015

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

1. M. HARRY CHRISMARJADI, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. LIA MALIATY, SH : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Drs. MUHAMAD DJUMHANA, SH, MH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. EVA MULDIANA, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. ARIS ARIFIN, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. ASEP HILMAN HERMAWAN,SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. RUDI VALENTINO TETEHUKA, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. YAYAN AHYANA, SH, MH. : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. MARYA ...

9. MARYA ARTHA PAULINA, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. R. YUYI YULIANI, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. YUDIE SEPTIAWAN, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. VETTY RUT MAWAR, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. RINA SITI FATIMAH FATAH, SH, MH: Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. NURULIZA, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. CHITRA PERMATA DEWI, SH : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001